



Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Masa Pandemi Covid-19

Anggraeny Puspaningtyas

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Yusuf Hariyoko

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yusufhari@untag-sby.ac.id

Eureka Ratna Nirmala

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
eurekarn23@gmail.com

Nabilla Larasati

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
larassbella0705@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe regional economic development through leading sectors in the city of Surabaya during the Covid-19 pandemic. During the Covid-19 pandemic, the regional economy received quite severe impacts, including reduced working hours, decreased wages, and a more serious problem was increasing unemployment and the inability to absorb new workers. The research uses a qualitative descriptive method with a research focus on four main components of regional economic development, namely the development of the economic base, institutions, human resource development, and technology development – technology adaptation. Data collection techniques were carried out by interview and document study. Sources of data come from Bappeda, the City Cooperatives and Micro Enterprises Service and the Surabaya City Manpower Service. The results of the study show that locality development by the Surabaya City government in the midst of the COVID-19 pandemic is carried out both physically in the form of facilities and infrastructure and non-physical development by conducting training needed by the community. In general, the institutional aspects are adequate, but their participation is still not as desired. In the aspect of human resource development, the development program is carried out by providing briefings to the community both related to honing skills or briefing on the rights they should get as workers. Aspects of technology adaptation are carried out through the development of the Ecobis System such as the MSME product marketplace. However, improvements also need to be made to overcome some of the weaknesses in each of these components.

Keywords: local economic development, leading sector

Corresponding author(s): Yusuf Hariyoko, email: yusufhari@untag-sby.ac.id

Article history: Received, 27 January 2022; Revised, 20 May 2022; Accepted, 29 May 2022.

To cite this article: Puspaningtyas, A., Hariyoko, Y., Nirmala, E. R., & Larasati, N. (2022). Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Masa Pandemi Covid-19. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 84–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p84-90>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengembangan ekonomi daerah melalui sektor unggulan di Kota Surabaya pada masa pandemic Covid-19. Selama pandemic Covid-19 perekonomian daerah menerima dampak cukup parah antara lain berkurangnya jam kerja, turunnya upah, dan masalah yang lebih serius adalah meningkatnya pengangguran dan ketidakmampuan menyerap tenaga kerja baru. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada empat komponen pokok pengembangan ekonomi daerah yaitu pengembangan basis ekonomi, kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi – adaptasi teknologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Sumber data berasal dari Bappeda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan lokalitas oleh pemerintah Kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19 dilakukan baik secara fisik berupa sarana dan prasana dan pengembangan non-fisik dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat. Aspek kelembagaan secara garis besar sudah memadai, namun peran sertanya masih belum sesuai dengan yang diinginkan. Pada aspek pengembangan SDM, program yang pengembangan dilakukan melalui pemberian pembekalan pada masyarakat baik yang terkait dengan mengasah skill atau pembekalan tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja. Aspek adaptasi teknologi dilakukan melalui pengembangan Sistem Ecobis seperti *marketplace* produk UMKM. Namun perbaikan juga perlu dilakukan untuk mengatasi beberapa kelemahan pada tiap komponen tersebut.

Kata Kunci: pengembangan ekonomi lokal, sektor unggulan

PENDAHULUAN

Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai bencana global. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi kehidupan ekonomi dunia. Kondisi ini bermula dari menyebarnya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dengan penyakitnya disebut sebagai Coronavirus Disease (COVID-19) yang diduga bermula dari Wuhan, Tiongkok (Yuliana, 2020). Pada awalnya belum diketahui apakah transmisi virus terjadi melalui interaksi antara manusia-manusia. Namun pada perkembangannya, jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu (Channel News Asia, 2020).

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak virus COVID-19 yang mana penyebaran ke sejumlah wilayah sangat cepat. Kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan *lockdown* diterapkan di berbagai daerah sampai dengan level yang paling rendah yaitu di tingkat RT dan RW. Berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi virus COVID-19. Dampak penyebaran virus ini sangat luar biasa mulai dari individu, komunitas, masyarakat luas, perusahaan, instansi pemerintah, negara maupun antar negara. Begitu Pula terhadap aspek kehidupan, diantaranya aspek kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diliputi rasa khawatir dan takut dalam menjalankan segala aktivitas di luar rumah.

Dampak yang paling dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah melemahnya perekonomian khususnya di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi. Rendahnya sentimen investor terhadap pasar membuat pasar cenderung ke arah negatif. Lambatnya

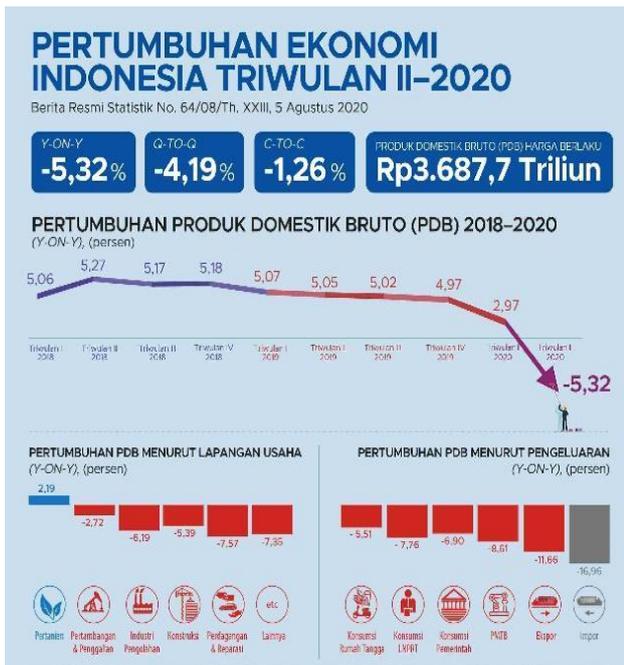
ekonomi global terutama kegiatan ekspor membuat memburuknya kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan perekonomian mengenai fiskal dan moneter sangat dibutuhkan agar perekonomian di berbagai daerah menggeliat. Jika dilihat pada data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan menjadi 2,97% sedangkan pada Triwulan II tahun 2020, mengalami kontraksi kembali menjadi -5,32%. Dapat dilihat perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan I dan II tahun 2020 pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I, 2020



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020



Sumber: BPS, 2020

Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi Provinsi Jawa Timur juga tidak luput dari dampak pandemi COVID-19. Menurut BPS, ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II 2020 (c-to-c) terkontraksi 1,51%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh 10,9%. Sementara dari sisi pengeluaran komponen yang tumbuh adalah Komponen Pengeluaran Pemerintah sebesar 1,56%, dan Ekspor Luar Negeri 2,00%, sedangkan komponen lain terkontraksi (BPS, 2020). Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mengatur strategi agar kondisi ekonomi stabil. Pemenuhan kebutuhan pangan masih terus didukung oleh Walikota Surabaya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dampak resesi sudah dirasakan oleh sebagian warga masyarakat Kota Surabaya diantaranya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perusahaan, berkurangnya daya beli masyarakat, perlambatan dan pemberhentian ekspor serta tindakan kriminalitas. Agar perekonomian Kota Surabaya tetap stabil, dorongan dan dukungan percepatan ekonomi melalui ekonomi kreatif dan UMKM. Namun perlu diketahui sektor unggulan Kota Surabaya yang dapat menjadi motor penggerak sektor-sektor lainnya hingga dapat berdaya saing.

Menurut Sjafrizal, “Pendekatan sektoral untuk memacu pertumbuhan beberapa sektor yang potensial melalui berbagai kemudahan yang disediakan pemerintah termasuk rangsangan untuk percepatan pengembangannya. pengembangan lintas sektor untuk mengaitkan pengembangan antara satu sektor dengan sektor lainnya berdasarkan hubungan yang fungsional” (Sjafrizal, 2008:217). Menurut Hariyoko dan Puspaningtyas (2020), “sektor-sektor unggulan di Kota Surabaya ada sebelas yaitu sektor jasa perusahaan; sektor

penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor real estate; sektor transportasi dan pergudangan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor informasi dan komunikasi; dan sektor jasa lainnya. Kesebelas sektor tersebut memiliki peran penting sebagai dasar untuk proses pembangunan ekonomi di Kota Surabaya”.

Pengembangan ekonomi dengan mengandalkan basis sektoral menurut (Saragih, 2015) adalah dengan “peningkatan dalam kapasitas ekonomi lokal untuk menciptakan kesejahteraan bagi penduduk lokal”. Pengembangan ini kemudian tidak terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh Kota Surabaya sebagai pemilik sektor tersebut. Menurut Blakely and Bradshaw, Pembangunan Ekonomi Lokal adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Donuisang, 2017). Sumberdaya pengembangan ekonomi lokal menurut (Blakely & Bradshaw, 2003) diantaranya: *Material* (fisik), *Man* (manusia), *Market* (pasar), *System Management* (manajemen sistem), *Money* (anggaran). Selanjutnya Menurut Blakely dan Bradshaw (2002:67) ada empat komponen dalam menyeleksi strategi pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. *Locality*; merupakan potensi lokal yang ada di daerah tertentu. Lokalitas ini sudah dikembangkan dan ada yang masih belum mengalami proses pengembangan.
2. *Business and economic base*; merupakan basis usaha dan ekonomi yang berkembang di kawasan tertentu.
3. *Human resources*; modal sumberdaya manusia yang bermukim dan melakukan aktivitas ekonomi dikawasan tersebut.
4. *Community resources*; merupakan sumberdaya komunitas yang berhubungan dengan pola interaksi yang mendasarinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan ekonomi daerah melalui sektor unggulan di Kota Surabaya pada masa pandemi? Untuk menjawab rumusan masalah ini peneliti menggunakan pendekatan empat komponen dalam pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely dan Bradshaw yaitu lokalitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi di masa pasca pandemi.

METODE

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh terkait dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang perlu diperhatikan saat proses penelitian. Sembilan karakteristik penelitian kualitatif menurut (Creswell, 2014:261-268), diantaranya: 1) Lingkungan alamiah; 2)

Peneliti; 3) Keragaman sumber data; 4) Analisis data induktif; 5) Makna/pemahaman pada masalah oleh partisipan/narasumber; 6) Rancangan yang berkembang; 7) Perspektif teoritis; 8) Penafsiran; dan 9) Pandangan yang menyeluruh

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan batasan pada proses penelitian, sehingga tidak mengalami penyimpangan dari rumusan masalah. Fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengembangan basis ekonomi;
2. Kelembagaan;
3. Pengembangan sumber daya manusia; dan
4. Pengembangan teknologi – adaptasi teknologi.

Penelitian dilakukan di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Sumber data ditentukan oleh beberapa pertimbangan yang mencakup antara lain:

1. Bappeda Kota Surabaya; staf yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya; staf bagian pengembangan UMKM, dan
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya; staf bidang pelatihan serta bidang tenaga kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengembangan basis ekonomi

Pengembangan lokalitas Kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19 bukan hanya pengembangan secara fisik berupa sarana dan prasana saja melainkan juga pengembangan non-fisiknya dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pengembangan lokalitas Kota Surabaya dengan membuka pembinaan untuk masyarakat Kota Surabaya yang akan membuka usaha ataupun ingin mengembangkan usaha mereka. Mengingat dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 membuat banyaknya karyawan dari perusahaan-perusahaan yang terkena PHK dan lebih memilih untuk membuka usaha sendiri. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini berupa membantu melakukan pemasaran produk, pengembangan *image* dari produk tersebut yang mana pembinaan tersebut mendatangkan narasumber yang ahli dibidangnya.

Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya ini khususnya menaungi usaha makan minum dan sentra kuliner. Penulis mengutip hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Ina Natalia Siswanto, staf sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro “*Kami sudah melakukan upaya pemulihan dan pendampingan di 44 sentra wisata kuliner. Dan kami hanya berperan sebagai fasilitator, menawarkan produk-produk UMK binaan yang sudah diuji kelayakan kepada pasar*”. Secara jelas, bahwasanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini sudah melakukan pemulihan dan pendampingan sentra-sentra kuliner di wilayah Kota Surabaya.

Pengembangan basis ekonomi yang mengutamakan lokalitas produk atau potensi daerah

secara keseluruhan masih belum maksimal. Potensi yang ada di Kota Surabaya masih perlu dipetakan ulang untuk mendapatkan potensi yang sesuai dengan kemampuan dan dapat dikelola masyarakat, misalkan UMKM makanan dan UMKM jasa perbengkelan. Pemetaan tersebut akan memiliki peran besar kedepannya untuk mendapatkan perlakuan yang dibutuhkan, karena masing-masing potensi membutuhkan perlakuan yang berbeda.

Pada pelaksanaan pengembangan basis ekonomi ini, perlu dikembangkan atau campurtangan dari pemerintah dalam mengatur pola interaksi masyarakat (Saragih, 2015). Usaha tersebut dapat diawali dengan mengembangkan sentra usaha yang sudah ada di Kota Surabaya. Hal ini menjadi penting dengan mempertimbangkan bentuk kolaborasi antar aktor yang dapat digarap. Kolaborasi tersebut harus di dukung dengan pembuatan kebijakan dan program yang berkelanjutan, penekanan pada isu spesifik pembangunan daerah sangat penting untuk menjadi acuan penentuan aktor yang akan terlibat (Deslatte, Swann, & Feiock, 2017). Basis ekonomi yang sudah jadi, juga perlu diberikan fasilitas pendukung seperti lembaga keuangan, bantuan pemasaran, tempat pelatihan, dan pos pendampingan.

2) Kelembagaan

Setiap kewenangan yang dimiliki oleh dinas atau instansi di setiap wilayah memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan individu yang ada di organisasi, peralatan, dan aspek sumber daya lain. Seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, mereka memiliki kewenangan hanya sebagai pembina dan fasilitator masyarakat Kota Surabaya untuk membuka sebuah usaha atau mengembangkan usahanya, dinas tersebut tidak mengambil untung sedikitpun bilamana suatu usaha milik masyarakat Kota Surabaya sudah berkembang pesat. Apabila ada masyarakat Kota Surabaya yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki dana untuk modalnya maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dinas sosial akan memberikan bantuan berupa bahan-bahan untuk menunjang usaha tersebut, dan dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Sosial tidak pernah memberikan bantuan berupa uang. Setelah diberikannya bantuan maka, Dinas Sosial akan memantau usaha tersebut. Jika diharuskan adanya inovasi maka dikembangkannya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, apabila usaha tersebut sudah memiliki omset yang tinggi dan lebih besar maka usaha tersebut akan melakukan pembinaan dengan Dinas Perdagangan, karena dinas perdagangan sendiri memiliki lingkup pemasaran yang sudah internasional.

Sedangkan pada Menurut Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan total 9.782.262 UMKM, Surabaya sendiri memiliki UMKM sebanyak 385.054. Dengan

banyaknya UMKM yang ada di Surabaya, sedangkan permintaan produk atau jasanya yang sedang menurun akibat Covid-19, tentunya menyebabkan penawaran yang ada berlebihan. Khususnya untuk usaha pangan yang tidak mendaftarkan *tenant* mereka di aplikasi ojek *online* atau usaha yang bergantung pada adanya acara besar seperti seminar, atau pameran, mereka tidak bisa menjual produk dalam jangkauan yang luas dan menyebabkan tidak lakunya produk yang mereka tawarkan. Pemerintah Kota Surabaya berusaha memberdayakan pelaku UMKM, mereka diajak berkolaborasi Bersama pemkot dalam upaya mengantisipasi dan menangani pandemi Covid-19. Mulai dari pembuatan masker, APD seperti baju hazmat dan *face shield*, hingga produk olahan makanan yang kemudian disalurkan kepada warga terdampak Covid-19. Produk kering tempe ada 165 UMKM, pembuatan abon 10 UMKM, pembuatan sambal pecel 49 UMKM, 11 UMKM pembuatan APD, dan 41 UMKM untuk membuat masker kain.

Kelembagaan secara garis besar sudah ada, namun masih ada catatan yang perlu diperbaiki. Peran serta kelembagaan tersebut masih belum sesuai dengan yang diinginkan di awal, contoh dalam pengelolaan UMKM yang ada tersebut masih belum mampu untuk dikoordinir dengan baik. pengelolaan dapat dilakukan dengan membentuk koperasi atau lembaga lain yang mempunyai tujuan untuk menjaga kesinambungan usaha dari UMKM. Peran serta pemerintah pusat dan daerah disini juga diperlukan untuk fasilitasi kebutuhan dari pengembangan kelembagaan. Kelembagaan yang paling mudah dibuat adalah koperasi (Wulansari, Hakim, & Ramdani, 2021). Pemerintah kota dapat membuat koperasi yang khusus mewadahi sektor unggulan di daerah tertentu. Peran koperasi tersebut harus ditentukan dengan jelas untuk mensejahterakan anggota. Pemerintah kota perlu melakukan kolaborasi dengan masyarakat sebagai pelaku usaha untuk memberikan pendampingan atau pembinaan koperasi tersebut.

Perbaikan ekonomi yang didukung dengan pengembangan UMKM akan mampu memberikan manfaat dalam menangani berbagai masalah ekonomi berbasis masyarakat. Masalah lain yang ditimbulkan oleh adanya pandemi dengan peningkatakn PHK juga berkontribusi peningkatan pengangguran yang kemudian akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada urusan ini, pemerintah perlu untuk melakukan antisipasi yang mampu mengurangi dampak negatif dari PHK, karena serapan tenaga kerja sektor ekonomi yang menurun (Maulidasari, 2018).

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya memiliki kewenangan dalam kinerjanya yaitu sebagai mediator antara perusahaan dan tenaga kerjanya. Pada masa pandemi saat ini banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK. Untuk tenaga kerja yang

dirumahkan, perusahaan harus memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan seperti gaji. Sedangkan, untuk tenaga kerja yang di PHK perusahaan pun harus memberikan hak-hak tenaga kerja seperti tunjangan. Kerap kali dalam situasi seperti masa pandemi banyak perusahaan yang tidak memberikan hak-hak kepada tenaga kerjanya. Disinilah tugas dari Disnaker sebagai mediator dan memfasilitasi mediasi yang dilakukan antara perusahaan dengan tenaga kerjanya. Selain sebagai mediator, Disnaker memiliki kewenangan untuk melakukan pembekalan. Program yang dilakukan untuk pembekalan pada masyarakat pun beragam, seperti pembekalan mengasah skill, pembekalan tentang pemahaman ke HRD, seperti bagaimana syarat dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja.

Upaya lain yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya untuk para pelaku UMKM yang tergabung dalam Pahlawan Ekonomi adalah pendaftaran Kartu Pra Kerja melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya, sejumlah 156 UMKM. Pendataan Bantuan Pelaku Usaha Mikro untuk Kementerian Koperasi dan UKM yang nantinya akan dimonitoring oleh dinas teknis bagaimana perkembangan omset Pelaku UMKM yang menerima bantuan tersebut. Selain itu bidang pariwisata, Pemerintah Kota Surabaya banyak melakukan berbagai peresmian tempat baru atau lokasi baru contohnya Plaza Surabaya/Alun-alun Surabaya/Balai Pemuda yang digunakan untuk para pekerja seni melakukan pentas. Pekerja seni termasuk dalam data para pekerja yang terdampak Covid-19. Sudah sempat berjalan dan terjadwal, namun pemkot Surabaya melakukan evaluasi yang diakibatkan minat masyarakat untuk melihat terlalu tinggi akibatnya penonton yang datang membludak. Meski sudah sesuai dengan protokol kesehatan di era *new-normal*, namun selaku Pemkot mengantisipasi dengan meninjau acara tersebut, saat ini dengan memberhentikan sementara waktu.

Peran SDM dalam pembangunan ekonomi lokal yang tidak bisa diabaikan perlu terus mendapat perhatian dan pembinaan, sehingga mampu untuk terus berkembang (Hariyoko, Soesiantoro, & Junaidi, 2021). Proses pengembangan manusia paling umum adalah dengan pendidikan, dan pelatihan. Pembuatan pelatihan dalam pengembangan ekonomi lokal, perlu lebih spesifik dengan yang dibutuhkan. Pemerintah kota sebagai pemangku kepentingan, juga perlu untuk bijak mau menerima keluhan kebutuhan pelatihan yang akan disediakan agar mendukung pengembangan ekonomi lokal.

4) Adaptasi Teknologi

Transaksi secara daring sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini karena mengurangi kontak langsung dengan sesama untuk memutus rantai virus, sehingga harus dilakukan pengefisiensannya. Bappeko Surabaya dalam proses pengembangan Sistem Ecobis yang isinya berbagai program di perangkat daerah teknis bidang ekonomi

Pemerintah Kota Surabaya, Program yang ada di dalam sistem tersebut antara lain terdapat UMKM yang akan dikembangkan seperti *marketplace* produk UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya. Pasar yang didalamnya terdapat informasi harga Bahan Pokok Penting untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Kedepannya akan dikembangkan lagi informasi tempat pariwisata yang dibuka di masa pandemi ini.

Namun, jauh sebelum adanya pandemi yang mengharuskan berjualan secara *online*, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sudah memberikan pelatihan tersebut. Tak hanya pemasaran secara *online*, tapi pemasaran di mall, sentra, *event* (Mlaku-Mlaku Tunjungan), pameran, dll. Pelatihan adalah salah satu usaha pemkot Surabaya untuk menaikkan omzet para UKM, di mana mereka diajarkan cara memfoto agar produk terlihat menarik, pembuatan kemasan, dll oleh narasumber yang memang ahli dibidang tersebut. Dari pembekalan pelatihan dan pembinaan yang sudah dilakukan, mereka menghadapi masa pandemi ini dengan inisiatif dan inovasi mereka sendiri dan dibantu pendampingan dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Sebagai pelaku UKM binaan, mereka memiliki semangat untuk berkembang dan maju, tujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya agar perekonomian warga Surabaya meningkat. Sayangnya, di masa pandemi ini tidak memungkinkan melakukan pelatihan secara langsung dan belum ada rencana untuk mengadakannya secara daring.

Proses adaptasi teknologi juga bisa mendapatkan bantuan dari pihak swasta atau pihak lain seperti akademisi. Pada dasarnya adaptasi teknologi perlu untuk berjalan secara dinamis dan adaptatif, sehingga akan sangat membutuhkan pendampingan. Pihak swasta bisa dilakukan dengan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan atau CSR, sedangkan pihak akademisi bisa dilakukan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tri dharmanya.

PENUTUP

Simpulan

Pengembangan lokalitas oleh pemerintah kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19 adalah pengembangan dalam rangka mengantisipasi agar dampak yang lebih buruk tidak terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan lokalitas oleh pemerintah Kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19 dilakukan baik secara fisik berupa sarana dan prasana dan pengembangan non-fisik dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat. Aspek kelembagaan secara garis besar sudah memadai, namun peran sertanya masih belum sesuai dengan yang diinginkan. Pada aspek pengembangan SDM, program yang pengembangan dilakukan melalui pemberian pembekalan pada masyarakat baik yang terkait dengan

mengasah skill atau pembekalan tentang hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja. Aspek adaptasi teknologi dilakukan melalui pengembangan Sistem Ecobis seperti *marketplace* produk UMKM. Namun perbaikan juga perlu dilakukan untuk mengatasi beberapa kelemahan pada tiap komponen tersebut.

Saran

Instansi pemerintah dengan berbagai kewenangan yang sudah ditentukan harus mampu untuk bekerja sama, karena pada dasarnya instansi-instansi yang berkepentingan tersebut harus mampu bersinergi dalam kebijakan dan kegiatan yang mereka buat. Pemerintah Kota Surabaya juga perlu memperkuat fungsinya sebagai fasilitator, karena cukup banyak dampak negatif yang timbul karena pandemi. Analisis tentang potensi lokal yang akan dikembangkan perlu diperdalam, karena dengan adanya analisis tersebut akan mampu menemukan sektor pengungkit yang berdampak luas pada masyarakat Kota Surabaya. Kelembagaan juga perlu dirapikan, sehingga mampu berkoordinasi dengan baik antar instansi, masyarakat, sektor swasta dan pihak lain yang berkepentingan di Kota Surabaya. Pola pengembangan SDM harus ditata dengan lebih baik, karena dengan banyaknya masyarakat yang di PHK perlu untuk diberikan bekal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya dalam melakukan usaha. Adaptasi teknologi juga perlu untuk ditingkatkan, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan, transfer pengetahuan atau sosialisasi yang akan mampu diterapkan dalam usahanya.

Sinkronisasi kebijakan antar OPD sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang selaras sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, mereka memiliki kewenangan hanya sebagai pembina dan fasilitator masyarakat Kota Surabaya untuk membuka sebuah usaha atau mengembangkan usahanya, Apabila ada masyarakat Kota Surabaya yang ingin membuka usaha namun tidak memiliki dana untuk modalnya maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Dinas Ketenagakerjaan Kota Surabaya memiliki kewenangan dalam kinerjanya yaitu sebagai mediator antara perusahaan dan tenaga kerjanya. Selain sebagai mediator, Disnaker memiliki kewenangan untuk melakukan pembekalan. Program yang dilakukan untuk pembekalan pada masyarakat pun beragam, seperti pembekalan mengasah skill, pembekalan tentang pemahaman ke HRD, seperti bagaimana syarat dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai pekerja. Transaksi secara daring sangat diperlukan dalam kondisi pandemi saat ini karena mengurangi kontak langsung dengan sesama untuk memutus rantai virus, sehingga harus dilakukan pengefisiensian. Bappeko Surabaya dalam proses pengembangan Sistem Ecobis yang isinya berbagai program di perangkat daerah teknis bidang ekonomi Pemerintah Kota Surabaya, Program yang ada di dalam sistem tersebut antara lain terdapat UMKM

yang akan dikembangkan seperti marketplace produk UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selaku pemberi dana penelitian ini. Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah Kota (BAPPEKO) Surabaya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang memberikan kerjasama dan data-data yang kami butuhkan dalam proses penelitian ini, serta masyarakat kota surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2020). Ekonomi Jawa Timur Triwulan II-2020 Terkontraksi 5,90 Persen. Diakses melalui <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2020/10/05/194/ekonomi-jawa-timur-triwulan-ii-2020-terkontraksi-5-90-persen.html> pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Turun 2,97 Persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020 Turun 5,32 Persen. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html> pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Blakely, E. J., & Bradshaw, T. K. (2003). *Planning local economic Development (theory dan practice)*. Third edition. New Delhi: Vistaar Publication.
- Channel News Asia. (2020). Wuhan virus outbreak: 15 Medical Workers Infected, 1 in Critical Condition. Diakses melalui www.channelnesasia.com/news/asia/wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Cetakan ke empat. Diterjemahkan oleh Ahmad Fawaid (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deslatte, A., Swann, W. L., & Feiock, R. C. (2017). Three sides of the same coin? A Bayesian analysis of strategic management, comprehensive planning, and inclusionary values in land use. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 27(3), 415–432. <https://doi.org/10.1093/jopart/muw054>
- Donuisang, Melkisedek Ruben. (2017). *Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Petik Mawar Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Malang*. ITN Malang
- Hariyoko, Y., Soesiantoro, A., & Junaidi, M. A. (2021). Pemberdayaan UMKM Batik Tulis di Kampoeng Batik Jetis oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.33005/JDG.V11I1.2478>
- Hariyoko, Yusuf & Anggraeny Puspaningtyas. (2020.) *Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan Kota Surabaya*. Malang: *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Maulidasari, C. D. (2018). Analisis Pelanggan Terhadap Metode Sharing Ekonomi Transportasi Online di Banda Aceh. *Jurnal Ekombis*, 4(1), 25–35.
- Saragih, J. R. (2015). *Perencanaan wilayah dan pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjafrizal. (2008). *Regional Economics (Theory and Application)*. Padang: Pranita Offset.
- Sjafrizal. (2009). *Practical Techniques for Preparing Regional Development Plans*. Padang: Baduose Media.
- Wulansari, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 82–93.